

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN

ABSTRAK

Kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan masih banyak terjadi hingga saat ini, tidak sedikit tersangka yang disiksa oleh penyidik kepolisian demi mengungkapkan bahwa tersangka lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Polisi sebagai Lembaga negara mempunyai berbagai tugas, salah satunya adalah dengan melakukan penyidikan yang membantu untuk menemukan serta mengumpulkan bukti dari suatu tindak pidana serta tersangkanya. Berdasarkan pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa pada saat proses penyidikan tersangka berhak untuk memberikan informasi secara bebas kepada penyidik kepolisian. Dalam tulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Yang menyebabkan penyidik kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dikarenakan faktor waktu interogasi yang sangat singkat, kurang atau sedikitnya anggaran dan fasilitas yang kurang memadai untuk menemukan bukti-bukti milik tersangka, sehingga polisi lebih memilih memfokuskan pada pengakuan tersangka. 2. Perlindungan terhadap tersangka sendiri bisa dilihat dari pasal 54 KUHAP yang berisi hak-hak tersangka atau terdakwa, setiap penyiksaan maupun hukuman yang tak manusiawi, kejam atau merendahkan martabat manusia merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 1998, dengan telah diratifikasinya peraturan tersebut maka diharapkan agar pemerintah Indonesia mampu untuk mencegah praktik penyiksaan dalam berbagai bentuk.

LEGAL PROTECTION AGAINST SUSPECTS OF VIOLENCE IN INVESTIGATIONS

ABSTRACT

Violence against suspects in the investigation process still occurs a lot today, not a few suspects are tortured by police investigators to reveal that it is the suspect who committed the crime. The police as a state institution have various tasks, one of which is conducting investigations that help find and collect evidence of a criminal act and the suspect. Based on article 52 of the Criminal Procedure Code, it is stated that during the investigation process the suspect has the right to give information freely to police investigators. In this final project, the author uses a normative juridical research method with a statutory approach. By using normative juridical research, it can be concluded: 1. What causes police investigators to commit acts of violence in the investigation process is due to the very short examination time, lack of or at least budget and inadequate facilities to find evidence belonging to the suspect. suspect, so that the police prefer to focus on the confession of the suspect. 2. The protection of the suspect itself can be seen from article 54 of the Criminal Procedure Code which contains the rights of the suspect or defendant, every torture or punishment that is inhuman, cruel or degrading to human dignity is a violation of human rights. Even though Indonesia has ratified the Convention Against Torture in 1998, with the ratification of the regulation, it is hoped that the Indonesian government can prevent the practice of torture in various forms.